

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara demokrasi, sebagai salah satu perwujudan demokrasi adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Menurut Nohlen pemilu adalah "satu-satunya metode demokratik" untuk memilih wakil rakyat. setiap warga dewasa di setiap negara berhak untuk memilih wakil rakyat. Melalui pemilu rakyat dapat memilih orang-orang yang akan dipilih sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Wakil rakyat tersebut sebagai orang yang akan bekerja mengambil keputusan atas nama rakyat juga bekerja mengatur jalannya pemerintahan selama periode yang ditentukan (Rasyid, 2017).

Pada pemilu legislatif dipilih wakil rakyat untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Tingkat Kabupaten/kota adalah salah satu acara penting dalam demokrasi di Indonesia. Pemilihan ini berfungsi untuk menentukan wakil-wakil rakyat di tingkat kabupaten/kota, yang akan memegang kendali legislatif di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan untuk lembaga eksekutif dipilih Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berbeda dengan presiden yang harus diusung oleh partai pengusung dengan minimal 20% kursi di DPR atau 115 kursi sedangkan calon

kepala daerah dapat mencalonkan diri dari perseorangan dan dapat diusung oleh partai politik atau gabaungan partai politik.

Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1955. Pemilu tahun 1955 hanya memilih perwakilan di legislatif, pada pemilu 1955 diikuti oleh 118 peserta untuk DPR dan 91 peserta untuk konstituante. Pada pemilu ini peserta berbentuk partai, golongan atau kelompok, bahkan ada peserta perseorangan dan gabungan perseorangan. Pada pemilu 1955 terdapat empat besar pemenang pemilu 1955 meliputi PNI, Masyumi, NU dan PKI (Sedana, 2020).

Pada pemilu 1971 yang mana pemilu ini merupakan awal pemilu di era orde baru di ikuti oleh 10 partai politik yaitu Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan Karya (Golkar), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). kemudian pada pemilu 1977 dimana dilakukan penyederhanaan partai yang sama programnya. Penyederhanaan partai ini ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat tiga partai hasil penggabungan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo dan Golongan Karya. Ketiga partai

ini sebagai peserta pemilu hingga pemilu 1997 atau pemilu terakhir di era orde baru. Pada masa ini partai Golkar menjadi partai yang paling dominan menguasai pemerintahan.

Pada awal reformasi karena desakan publik pemilu yang seharusnya terjadi pada tahun 2002 dipercepat pada tahun 1999. Pada pemilu 1999 kembali diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, MPR menambahkan pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pemilu pertama hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diselenggarakan untuk memilih lembaga eksekutif presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 dan kepala daerah pada tahun 2005.

Partai Golkar adalah salah satu partai politik yang telah lama berperan dalam politik Indonesia. Partai ini memiliki sejarah panjang dan pernah menjadi partai penguasa pada masa Orde Baru. Partai Golongan Karya atau lebih dikenal dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai yang mengacu pada konsep kerja bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai golongan masyarakat yang diadvokasi oleh partai ini. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman (Golkar, 2019).

Sejarah Partai Golkar melibatkan hubungan yang erat dengan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Partai Golkar mendominasi pemandangan politik selama puluhan tahun pada saat

pemerintahan Soeharto, dan seringkali disebut sebagai "partai penguasa" yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu. Namun, seiring perubahan politik dan reformasi demokrasi pada akhir tahun 1990-an. Golkar telah berkompetisi dalam pemilihan umum Indonesia dan terus menjadi salah satu partai besar di negara ini.

Kabupaten Indramayu memiliki karakteristik politik, sosial, dan ekonomi yang unik, termasuk partai Golkar. Dimana setelah orde baru runtuh partai Golkar tetap eksis di Kabupaten Indramayu. Berikut disajikan tabel perolehan kursi DPRD Kabupaten Indramayu di empat periode pemilu sejak tahun 2004 hingga tahun 2019 dimana partai Golkar selalu menjadi partai penguasa legislatif di Kabupaten Indramayu.

**Tabel 1. 1 Jumlah Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Indramayu Periode Pemilu 2004 hingga 2019**

No.	Nama Partai	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1	Partai Golkar	20	24	19	22
2	PDIP	11	7	7	7
3	PKB	8	5	7	7
4	Gerindra	-	2	5	6
5	Demokrat	-	5	3	3

Sumber: KPU Kabupaten Indramayu

Dilihat dari tabel diatas partai Golkar selalu meraih kursi terbanyak pasca reformasi di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu sendiri

memiliki jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi dari enam daerah pemilihan (dapil). Pada pemilu 2004 Golkar mendapatkan 20 kursi, kemudian meningkat pada pemilu tahun 2019 dengan perolehan 24 kursi, Pada pemilu tahun 2014 Golkar kembali meraih kursi terbanyak dengan 19 Kursi namun ada penurunan jumlah kursi dari periode pemilu sebelumnya. Hal ini Berdasarkan hasil rekapitulasi Ketua KPU Indramayu, M Hadi Ramdhan: Golkar mendapat suara terbanyak: 335.474 suara untuk DPRD Indramayu dan hanya mendapat 19 Kursi. Di posisi kedua adalah PDI Perjuangan dengan 130.991 suara, disusul oleh PKB dengan 106.433 suara (Adi, 2014).

Pada Pemilu tahun 2019 Golkar kembali meraih kursi terbanyak di Kabupaten Indramayu, bahkan ada peningkatan dari periode pemilu sebelumnya. Dimana Kemenangan Partai Golkar pada Pileg DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2019 Golkar memperoleh 22 kursi di DPRD Kabupaten Indramayu dengan total suara 38,51%, perolehan ini lebih besar dari periode pemilu tahun 2014. Perolehan kursi tertinggi partai Golkar diempat periode pemilu DPRD Kabupaten Indramayu pada empat periode pemilu terakhir selalu mengungguli partai-partai lain di Indramayu, hal ini menunjukkan eksistensi partai Golkar di Kabupaten Indramayu berhasil disetiap periode pemilunya. Bukan hanya itu, adanya kenaikan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Indramayu yang pada edisi 2014 Golkar mendapatkan 19 kursi dan meningkat pada pemilu tahun 2019 dengan 22 kursi membuktikan kepercayaan masyarakat Indramayu terhadap partai Golkar terus meningkat.

Kejayaan Partai Golkar juga tidak lepas dari kepemimpinan almarhum Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin atau yang biasa akrab disebut "Kang Yance". Pengaruh besar dari Kang Yance membawa dampak yang sangat signifikan terhadap eksistensi dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Indramayu Terhadap Golkar. Kang Yance merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Pernah Menjabat ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan merupakan mantan Bupati Indramayu dari Partai Golkar yang menjabat selama dua periode dari tahun 2000-2005 dan 2005-2010. Pada periode selanjutnya juga Indramayu Kembali dipimpin oleh istrinya Hj, Anna Sophana, yang kembali memimpin Indramayu selama dua periode sejak tahun 2010-2015 dan 2015-2018 namun mengundurkan diri karena alasan keluarga dan pada 16 Agustus 2020 Kang Yance meninggal dunia.

Pada pemilihan bupati Kabupaten Indramayu tahun 2020 calon bupati yang diusung partai Golkar yaitu Daniel Mutaqien Syafiuddin yang merupakan anak Yance yang dipasangkan dengan H. Taufik Hidayat Kalah oleh pasangan Nina Agustina dan Lucky Hakim yang diusung oleh partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan partai Nasdem. Kekalahan ini menjadi kekalahan pertama Golkar setelah dominasi partai Golkar selama dua puluh tahun lebih dalam merebut kursi bupati Kabupaten Indramayu.

Pada tahun 2024 pemilihan umum kembali diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden juga akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur beserta bupati dan wakil bupati secara serentak yang direncanakan

pada Rabu 27 November 2024. Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2024. Kabupaten Indramayu memiliki jumlah daftar pemilih tetap yang ditetapkan KPU Indramayu pada Selasa 27 Juni 2023 sebanyak 1.373.776 yang diantaranya 691.355 laki-laki dan 682.421 merupakan perempuan.

H. Syaefudin mendapat mandat untuk maju pada pilkada Kabupaten Indramayu 2024 sesuai hasil rapat kerja daerah DPD partai Golkar Kabupaten Indramayu ke X tahun 2022. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada 21 November 2023 telah merekomendasikan bapak H. Syaefudin, S.H., M.H. sebagai bakal calon bupati Kabupaten Indramayu sesuai dengan pernyataan dari akun Instagram pribadinya @h\_syaefudin68.official pada 22 November 2023 yang menyatakan bahwa "Bertempat di kantor @dpp.partaigolkar, kemarin saya menerima Surat tugas untuk bakal calon Bupati Kab. Indramayu melalui Kordinator Badan Pemenangan Pemilu Jawa I dan SiaPG dalam memenangkan Pileg, Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Untuk Indramayu yang lebih baik lagi. Aamiin Yra" Pungkasnya.

Pada pemilu tahun 2014, H. Syaefudin maju dalam pencalonan DPRD Kabupaten Indramayu di Dapil 1 Indramayu melalui partai Golkar. H. Syaefudin mendapatkan suara sebanyak 7.051 dengan perolehan suara ini menghantarkan dia duduk dikursi DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019. Pada pemilu tahun 2019, H. Syaefudin kembali maju dalam pencalonan DPRD Kabupaten Indramayu dan mendapatkan suara sebanyak 14.046, meningkat dari periode sebelumnya. Selain mendapatkan kursi DPRD

Kabupaten Indramayu H. Syaefudin juga terpilih sebagai ketua DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2019-2024 dari fraksi partai Golkar. H Syaefudin juga merupakan ketua DPD partai Golkar Kabupaten Indramayu dan ketua beberapa organisasi seperti ketua Karang Taruna Kabupaten Indramayu dan ketua umum pengurus cabang Persatuan Menembak Indonesia (perbakin) Indramayu.

Dengan adanya berbagai macam perosalan di atas maka perlu melihat elektabilitas H. Syaefudin di Kabupaten Indramayu sebelum maju dalam pilkada Indramayu 2024. H. Syaefudin dihadapkan dengan faktor lainnya sepeninggalan Yance dan kekalahan Golkar pada pemilihan bupati Indramayu tahun 2020. Bagaimana elektabilitasnys sebagai bakal calon bupati dari partai Golkar di Indramayu akan layak atau tidak. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Indramayu apakah akan setia terhadap Golkar dan kader sebagai calon-calon kepala daerah dari partai Golkar atau mulai meninggalkan Golkar.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Riki Firmansyah dengan judul penelitian elektabilitas pasangan calon Khamamik dan Saply pada pemilukada kabupaten Mesuji Tahun 2017. Dalam penelitian ini dijelaskan faktor yang mempengaruhi kekalahan dari pasangan Kamamik dan Saply dari faktor internal dimana tim pemenangan yang tidak loyal dan faktor eksternal karena isu pandangan negatif dari masyarakat karena kurangnya kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Khamik sebagai bupati Mesuji periode tahun sebelumnya (Firmansyah, 2018).



Penelitian terdahulu oleh Octaviani Safruddin dengan judul Pengaruh Citra Politik Terhadap Elektabilitas Anies Baswedan Menjelang Pemilu 2024. Dalam penelitian ini menjelaskan citra politik Anies baswedan ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dapat membangun kepercayaan masyarakat sehingga dapat mendongkrak elektabilitasnya sebagai modal untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 (Safruddin, 2022).

Perbedaan dengan penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah penelitian ini akan meneliti tingkat elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syaefudin dari partai Golkar dengan menggunakan variabel agama dari faktor sosiologis, variabel kepemimpinan dari faktor psikologis dan variabel visi dan misi dari faktor rasionalitas, ketiga variabel ini akan di ukur seberapa besar pengaruhnya terhadap elektabilitas H. Syaefudin.

Penelitian ini penting karena akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana elektabilitas bakal calon bupati Indramayu H. Syefudin dari partai Golkar, yang dapat memberikan wawasan kepada pemangku kebijakan, analis politik, dan masyarakat umum tentang kondisi politik lokal di wilayah Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai panduan bagi Partai Golkar dalam mengembangkan strategi politiknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman politik lokal di Kabupaten Indramayu dan menjadi bahan referensi bagi peneliti-paeneliti selanjutnya yang tertarik untuk memahami dinamika politik di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka perumusan masalah yang diangkat penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Agama terhadap Elektabilitas H. Syaefudin bakal calon bupati Indramayu dari partai Golkar?
2. Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan terhadap Elektabilitas H. Syaefudin bakal calon bupati Indramayu dari partai Golkar?
3. Bagaimana Pengaruh Visi-Misi terhadap Elektabilitas H. Syaefudin bakal calon bupati Indramayu dari partai Golkar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Pengaruh Agama terhadap Elektabilitas H. Syaefudin bakal calon bupati Indramayu dari partai Golkar.
2. Mengetahui Pengaruh Kepemimpinan terhadap Elektabilitas H. Syaefudin bakal calon bupati Indramayu dari partai Golkar.
3. Mengetahui Pengaruh Visi-Misi terhadap Elektabilitas H. Syaefudin bakal calon bupati Indramayu dari partai Golkar.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan penulis dan penerapan materi perkuliahan.
2. Memberi pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi elektabilitas calon bupati partai Golkar dilihat dari teori perilaku pemilih dengan faktor sosiologis, psikologis dan rasional.
3. Menjelaskan fenomena politik lokal yang ada di Kabupaten Indramayu.

### **1.4.2. Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi partai politik, pemilih, dan peneliti lainnya dalam mengerti dinamika politik di Kabupaten Indramayu.
2. Memberikan data dan informasi yang relevan bagi masyarakat, media, dan pihak terkait lainnya untuk memahami dinamika politik lokal di Indramayu.
3. Dapat digunakan partai politik atau bakal calon bupati sebagai tolak ukur atau menentukan strateginya.